

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Akil Rahman, 2016). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Wida, 2016).

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pada kenyataannya yang terjadi di kampung Doromena, distrik Depapre Kabupaten Jayapura tidak mengetahui akan pentingnya akuntabilitas keuangan desa. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan karena tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik. Sebagai masyarakat yang membayar pajak, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa saja dana yang dipercayakan kepada pemerintah.

Menurut Mustofa (2012), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Selain itu partisipasi masyarakat dalam penelitian Pramita dan Lilik (2010), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Peraturan menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan penanggungjawaban. Disamping itu permendagri No.113 Tahun 2014 ini

mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Ada beberapa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kampung Doromena Distrik Depapre terlaksana dengan baik, penggunaan dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan tepat sasaran dan merata. Disisi lain problem yang dihadapi di dalam masyarakat kampung Doromena seperti tidak dimanfaatkan buruh harian setempat sehingga terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Ini berdampak kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dalam buruh kasar, sehingga menimbulkan dampak negatif secara sosial ekonomi.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di desa akan memberikan dampak positif untuk desa. Pemanfaatan dana desa disalurkan untuk kepentingan di desa baik dalam pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Namun dari sisi lain sebagian masyarakat tidak mampu memberikan kontribusi dengan adanya dana sehingga masyarakat tidak paham realisasi dana desa. Ini diakibatkan tidak ada peran aktif sebagian masyarakat dalam ikut rapat yang dibuat oleh pemerintah desa. Ini juga berdampak tidak baik dalam ikut serta sebagian masyarakat tidak ada kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi

pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa pernah dilakukan oleh Risyana dan Indang (2017) tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, yaitu transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, begitupun dengan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mengacu pada Safrida Putri (2017) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di kecamatan mesjid raya kabupaten aceh besar). Hasil penelitian Safrida (2017) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penelitian ini penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Di Kampung Doromena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap optimalisasi penggunaan Dana Desa di Kampung Doromena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap optimalisasi penggunaan Dana Desa di Kampung Doromena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap optimalisasi penggunaan Dana Desa di Kampung Doromena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap optimalisasi penggunaan Dana Desa di Kampung Doromena Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut ini,

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang ada dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat Kampung Doromena dan menjadi salah satu pilar pembangunan sarana-prasarana kampung Doromena yang memadai.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam melakukan penelitian khususnya dalam Akuntansi Sektor Publik.